



## Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar

I Wayan Tagel Winarta<sup>1</sup>, Anak Agung Gede Raka<sup>1</sup> dan I Made Sumada<sup>2</sup>

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali

2. PS MIA Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar

Correspondence E-mail: [agungraka@warmadewa.ac.id](mailto:agungraka@warmadewa.ac.id)

### Abstract

Gianyar Regency is one of the regencies in Bali Province that has provided Social Aid funds to the community, a reality in the field that the distribution of Social Aid funds in Gianyar Regency has not been maximized. What factors influence the distribution of the Social Assistance Fund Policy in Gianyar Regency? And the aim is to Know the Distribution of Social Assistance Fund Policy in Gianyar Regency and to find out the factors that influence the distribution of Social Assistance Fund Policy in Gianyar Regency. By using descriptive qualitative research methods, using data collection techniques of observation, interviews and documentation, as well as research subjects in the Gianyar Regency Government. Using the policy evaluation theory from William Dun, with the results of the Effectiveness research: Social Assistance Fund Policy (Bansos) in Gianyar Regency has not been effective, this can be seen from the many people who submit requests for assistance from the government, Efficiency: The Social Aid Fund Policy is not enough efficient, that is because there are still many people who do not understand about, adequacy faced by the community is quite appropriate, this is because the community feels helped and this policy is right to overcome their problems, smoothing the costs and benefits distributed to the same community, community response is very good, and the targeting accuracy of the Bansos Fund Policy is not quite right, because there are still communities / groups / organizations / sekaa who receive the Bansos Fund more than once.

**Keywords:** Evaluation of policies, social assistance funds, Gianyar district government.

### Abstrak

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali telah memberikan dana Bansos kepada masyarakat, kenyataan di lapangan bahwa penyaluran dana Bansos di Kabupaten Gianyar belum maksimal. Berdasarkan masalah di atas penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu Bagaimanakah penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar?, Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar? Dan tujuan adalah untuk Mengetahui Penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, serta objek penelitian di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dun, dengan hasil penelitian Efektivitas: Kebijakan Dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Gianyar belum efektif, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, Efisiensi: Kebijakan Dana Bansos ini belum cukup efisien, hal itu karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai, Kecukupan yang dihadapi masyarakat sudah cukup tepat, hal ini karena masyarakat merasa terbantu dan kebijakan ini tepat untuk mengatasi masalah mereka, Perataan biaya dan manfaat yang didistribusikan kepada masyarakat sama, Respon masyarakat sangat baik, dan ketepatan sasaran dari Kebijakan Dana Bansos kurang tepat, karena masih adanya masyarakat/kelompok/organisasi/sekaa yang menerima Dana Bansos lebih dari sekali

**Kata Kunci:** Evaluasi kebijakan, dana bansos dan pemerintah kabupaten Gianyar.

**How to Cite:** Winarta, I, W, T., Raka, A, A, G., Sumada, I, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1): 28-27*

## 1. Pendahuluan

Sejak reformasi tahun 1998 Indonesia mengubah sistem pemerintahan daerahnya, dari sistem sebelumnya yang menerapkan sistem sentralisasi dimana segala kekuasaan dan kewajiban terpusat berada di pemerintahan pusat menjadi sistem desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah disertai dengan pengalihan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, salah satunya adalah dana bantuan sosial (Darmastuti & Setyaningrum, 2009). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupatten yang ada di Provinsi Bali yang telah memberikan dana Bansos kepada masyarakat, adapun banyak dan besarnya dana Bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar, sebagaimana daftar tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
Jumlah Masyarakat Penerima Dana Bansos  
di Kabupaten Gianyar

No	Tahun	Target (Rp)		Realisasi (Rp)	
		Unit	Rp	Unit	Rp
1	2018	194	23.823.143.500	156	7.675.000.000
2	2019	135	18.541.609.380	130	6.590.000.000

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa penyaluran dana Bansos di Kabupaten Gianyar belum maksimal. Salah satu penyebab turunnya pencairan dana Bansos oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar karena banyak terjadinya penyalahgunaan dana Bansos yang kurang sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka judul penelitian peneliti, yaitu Evaluasi Penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar. Bagiamanakah penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar? Fakator-faktor apakah yang mempengaruhi penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar.

## 2. Konsep

### *Konsep Evaluasi*

Evaluasi kebijakan ialah salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan untuk mempelajari suatu hasil dari kebijakan yang telah dilaksanakan untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### *Konsep Bantuan Sosial*

Pengertian Bantuan Sosial Menurut Kementerian Sosial (2011:15) bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.

### *Evaluasi Kebijakan*

Kebijakan publik merupakan suatu pilihan untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap penyelesaian dari suatu masalah, lebih lanjut dikatakan oleh Dye (1999:2) yaitu “ Public policy is whatever governments choose to do or not to do”. Mustopadijaja (2003:5) merumuskan lebih

operasional lagi, yaitu :

kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah, Negara dan pembangunan.

Salah satu tugas penting dari pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan suatu negara serta dalam rangka memberikan pelayanan terbaik yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan warganya mau tidak mau pemerintah harus membuat suatu kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara dan masyarakat, dengan demikian kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan dari pada negara sudah barang tentu akan menimbulkan dampak. Dampak tersebut bisa bersifat positif apabila keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh Negara dan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik dan tujuannya juga bisa terpenuhi, dan juga bisa bersifat negatif apabila dapat merugikan sebagian besar dari kepentingan dan keinginan masyarakat dan Negara tidak bisa dilaksanakan dan tidak dapat terpenuhinya kepentingan dari Negara dan masyarakat. Karena sebuah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah merupakan pilihan yang harus dilakukan, dimana pilihan tersebut merupakan pilihan yang terbaik dari sedemikian banyak tersedianya alternatif-alternatif yang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan negara dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.

Pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Mengingat banyaknya kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat mencapai tujuannya, dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut agar dapat berjalan efektif dan efisien dan agar kebijakan publik dapat mencapai tujuannya atau tidak mengalami kegagalan maka sangat perlu dilakukan pengawasan. Menurut Nugroho (2009:535) adalah :

sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Berdasarkan pendapat Nugroho tersebut diatas, sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah perlu dilakukan pengawasan agar dalam mengimplementasikan kebijakan publik tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan serta tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai, serta untuk menilai berhasil dan tidaknya sebuah kebijakan publik perlu dilakukan evaluasi. Tidak semua kebijakan publik setelah diimplementasikan akan berhasil dan begitu juga sebaliknya tidak semua kebijakan publik gagal dalam implementasinya, kegagalan tersebut menurut Hogwood dan Gunn dikutip oleh Wahab (1990:47-48) disebabkan oleh, (1) karena *non implementation* (tidak diimplementasikan) dan (2) karena *unsuccessful* (implementasi yang tidak berhasil). Sesuai dengan hal tersebut kegagalan sebuah kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuannya tidak semata-mata disebabkan karena salah memilih alternatif-alternatif kebijakan publik, akan tetapi dapat disebabkan karena memang tidak pernah diimplementasikan dan juga disebabkan oleh kebijakan publik tersebut telah diimplmentasikan tapi pada tahap diimplementasikan tidak sesuai dengan tujuan utama dari sebuah kebijakan, artinya implementor tidak paham dengan maksud serta tujuan dari kebijakan publik.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya oleh Dye sebuah kebijakan merupakan apa yang dipilih untuk dikerjakan dan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, dari pilihan tersebut memiliki dampak yang sama terhadap penyelesaian suatu masalah. Dari semua kebijakan yang diputuskan untuk dilakukan oleh pemerintah tidak semua kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari sebuah

kebijakan, dengan demikian setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan evaluasi oleh tim evaluator dengan tujuan apakah kebijakan tersebut dapat diteruskan ataukah kebijakan tersebut harus diberhentikan, sejalan dengan pendapat Winarno (2012:228-229) “adalah evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Evaluasi kebijakan adalah merupakan suatu penilaian yang diberikan terhadap suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif atau suatu perubahan yang lebih baik dari sebelum kebijakan tersebut dilakukan, ataukah sebaliknya sama sekali tidak memiliki dampak perubahan terhadap suatu kebijakan, atau dengan lain kata evaluasi kebijakan merupakan pekerjaan untuk memberikan estimasi, *assesment* atau penilaian terhadap suatu kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson (2003:245) adalah “*policy evaluation encompasses the estimation, assessment, or appraisal of a policy, including its content, implementation, goal attainment, and other effects*”.

### Tujuan Evaluasi

Menurut Subarsono (2016:120-122), evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

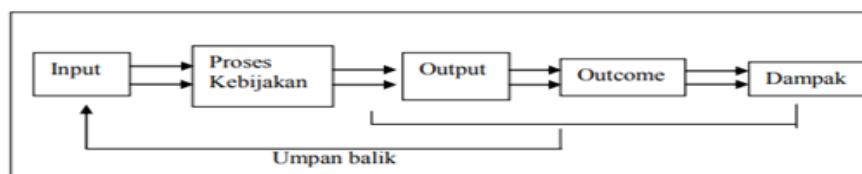
Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.

Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap ini lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak positif maupun negatif.

Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran pencapaian target.

Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.



**Gambar 1**  
Kebijakan Sebagai Sebuah Proses

Input adalah bahan baku (raw materials) yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan. Input tersebut berupa sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, tuntutan-tuntutan, dukungan masyarakat.

Sistem politik melalui para aktornya melakukan proses konversi dari input menjadi output. Selama proses konversi ini terjadi bargaining dan negosiasi antar para aktor yang berkepentingan yang mungkin berbeda atau bisa sama.

Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan program.

Sedangkan outcome adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan.

Impact (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan diimplementasikan.

### ***Alasan Evaluasi Kebijakan***

Evaluasi sangat diperlukan untuk keperluan jangka panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan (sustainable) suatu program. [Subarsono \(2016:123-124\)](#) memberikan beberapa argumen perlunya evaluasi.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.

Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.

Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholder, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.

Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

### ***Pendekatan Terhadap Evaluasi***

Dunn dalam [Subarsono \(2016:124-125\)](#) menyebutkan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni:

Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation) Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid tentang hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.

Evaluasi Formal (Formal Evaluation) Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara formal diumumkan sebagai sasaran program kebijakan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara formal merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. [Dunn \(2013:614\)](#) menyebutkan, evaluasi formal memiliki dua tipe utama, yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Sebaliknya, evaluasi formatif meliputi usaha-usaha untuk secara terus-menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target formal. Karakteristik evaluasi formatif adalah jumlah titik waktu dimana hasil kebijakan dipantau.

Evaluasi Proses Keputusan Teoritis (Decision Theoretic Evaluation) Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders. dalam hal ini, evaluasi

keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholders.

### Indikator Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penelitiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. [Dunn \(2013:610\)](#) mengembangkan indikator atau kriteria evaluasi mencakup enam indikator sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
Indikator Evaluasi Kebijakan

NO	Kriteria	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
4	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata pada kelompok masyarakat yang berbeda?
5	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber : [Dunn, 2013:610](#)

#### Efektivitas

Dunn dalam [\(Lejiu, Masjaya, & Irawan, 2014\)](#) menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

#### Efisiensi

Menurut Dunn dalam [Lejiu dkk. \(2014\)](#) menjelaskan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

#### Kecukupan

Dunn dalam [Lejiu dkk. \(2014\)](#) menyampaikan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas yang mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang ada.

#### Pemerataan

Dunn dalam [Lejiu dkk., \(2014\)](#) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. [Lejiu dkk. \(2014\)](#) juga mengatakan bahwa kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang usahanya didistribusikan secara adil. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.

#### Responsivitas

Keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh apa yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Kriteria responsivitas penting karena analisis dapat memuaskan kriteria lainnya (Dunn dalam Lejiu dkk. (2014).

#### Ketepatan

Dunn dalam Lejiu dkk. (2014) mengatakan bahwa ketepatan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasi tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan.

Berdasarkan uraian mengenai pendekatan-pendekatan evaluasi serta kriteria-kriteria evaluasi yang telah disebutkan pada tabel di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan formal dengan tipe evaluasi formatif.

#### ***Most Significant Change (MSC)***

Technique dalam Evaluasi Program Davies & Dart (2005:8) menjelaskan, MSC adalah sebuah teknik monitoring dan evaluasi partisipatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan yang paling penting dalam kehidupan kelompok masyarakat, keluarga, ataupun perorangan, sebagai hasil dari keikutsertaan mereka dalam program pembangunan. Pendekatan MSC akan melakukan penilaian terhadap perubahan yang bisa dicapai dengan membandingkan antara indikator perubahan dalam tujuan yang direncanakan pada awal program dan perubahan yang dirasakan penerima manfaat. Alasan mengapa perlu menggunakan pendekatan MSC, yaitu:

Orang menyampaikan cerita secara alami

Cerita dapat menguraikan kerumitan dan konteks

Orang ingat dengan cerita

Cerita dapat membawa pesan yang sulit atau hal-hal yang sulit dapat didiskusikan

Tetapi cerita tidak diketahui akurasi atau kebenarannya

Penggunaan teknik MSC dalam penelitian ini berguna sebagai teknik analisis data bagi peneliti untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan cerita-cerita kecil mengenai perubahan yang ditulis atau disampaikan penerima program. Pada konteks inilah cerita perubahan memenuhi syarat sebagai metode evaluasi partisipatif, sebab penilaian bukan datang dari pelaksana program, melainkan berdasarkan apa yang benar-benar dirasakan penerima manfaat program.

### **3. Metode**

Penelitian Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Informan penelitian ini adalah: (1) bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar, (2) Masyarakat Penerima Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar, dan (3) Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gianyar.

Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti, yaitu (1) Metode Observasi, (2) Metode Wawancara, dan (3) Metode Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teori Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) aktifitas dalam analisis data yaitu meliputi : (1) Pengumpulan Data (Data Collection), (2) Reduksi Data (Data Reduction), (3) Teknik Most Significant Change (MSC), (4) Penyajian Data (Data Display), dan (5) Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing).

#### **4. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar. Dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn yang terdiri dari 6 indikator yang berhubungan dengan evaluasi program. Dengan adanya teori ini diharapkan dapat menjelaskan secara jelas tentang evaluasi kebijakan Dana Basos di Kabupaten Gianyar

##### ***Efektivitas***

Untuk mengetahui hasil evaluasi suatu program, ada beberapa indikator yang harus diteliti, yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas menurut Sedarmayanti (2009: 59) merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Secara umum, efektivitas menunjukkan sejauh mana tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam mengukur efektivitas suatu program.

Dana Bantuan Sosial (BANSOS) merupakan program pemerintah pusat yang bersifat nasional dan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam dana. Untuk melihat efektivitas kebijakan Bansos di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali ini dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan kebijakan ini tercapai. Berkaitan dengan itu, penulis melakukan wawancara mengenai efektivitas kebijakan Bansos tersebut dengan salah satu Kepala Sub. Bagian Kelembagaan dan Aparatur Desa/Kelurahan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Gianyar, yang mengatakan:

“Dalam mencapai tujuannya, program Bansos ini sudah cukup efektif walaupun tingkat kemiskinan cukup tinggi dan kuota Penerima Manfaat Bansos ini terbatas, sehingga tidak cukup untuk menampung semua masyarakat yang ada di Kabupaten Gianyar, maka dari itu pihak dari Pemerintah Kabupaten Gianyar mengusulkan kepada pemerintah pusat penambahan bantuan yang ditujukan untuk masyarakat. Meskipun begitu jika dilihat dari tujuan program itu sendiri maka terlihat jelas kalau program ini sudah cukup efektif, karena dengan adanya program ini banyak masyarakat yang merasa terbantu.” (Hasil Wawancara pada tanggal 17 Nopember 2019).

Menurut informan di atas, kebijakan Dana Bansos di Kabupaten Gianyar sudah cukup efektif jika dilihat dari tujuan program itu sendiri. Hal serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, yang mengatakan:

“Menurut saya, kebijakan ini cukup efektif dalam mencapai tujuannya. Karena masyarakat pasti sudah sangat terbantu dengan adanya kebijakan ini, walaupun masyarakat harus melakukan mekanisme permohonan bansos dalam bentuk proposal, Masyarakat cukup dengan membuat proposal permohonan dana bansos kepada Bupati, selanjutnya pemohon atau masyarakat tinggal menunggu persetujuan dan verifikasi pencairannya.” (Hasil wawancara pada tanggal 17 Nopember 2019).

Pendapat yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Kepala Sub. Bagian Agama dan Sosial Sekretariat Pemerintah Kabupaten Gianyar mengatakan:

“Sudah efektif, namun karena pemutakhiran datanya kurang update jadi ada juga beberapa penerima sudah pernah mendapatkan Bansos, organisasi/Sekaa yang sudah bubar namun tetap terdaftar dalam penerima manfaat kebijakan Bansos. Untuk mengatasi hal seperti ini pihak kelurahan/desa akan melakukan verifikasi data penerima Bansos, tetapi walaupun sudah di verifikasi oleh pihak kelurahan/desa. Jadi memang masih banyak masyarakat kurang mampu yang seharusnya lebih berhak



untuk mendapatkan manfaat dari program pemerintah ini tetapi tidak mendapatkannya, sehingga program ini menjadi tidak tepat sasaran karena kurangnya update tersebut”. (Hasil Wawancara pada tanggal 23 Nopember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa informan di atas, kebijakan Dana Bansos sudah cukup baik dan cukup efektif dalam mencapai tujuannya untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin. Namun menurut penulis kebijakan Bansos di Kabupaten Gianyar ini belum cukup efektif, hal tersebut dikarenakan masih adanya masyarakat yang berhak mendapatkan program ini tetapi tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

### ***Efisiensi***

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2013:430). Efisiensi merupakan ukuran yang digunakan mengukur keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai dari segi sumberdaya atau nilai untuk mencapai keberhasilan dari kegiatan tersebut. Lebih sederhananya Dunn mengatakan bahwa efisiensi dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan “Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?”.

Penyaluran kebijakan Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar sudah cukup efisien, hal tersebut karena informan beranggapan bahwa sesuatu dapat dikatakan efisien ketika apa yang menjadi tujuan dari program tersebut sudah tercapai, dan menurut informan tujuan program Dana Bansos ini sudah tercapai dan sangat menguntungkan dan membantu masyarakat yang kesulitan mencukupi kebutuhan pokoknya. Pendapat ini juga sejalan dengan yang disebutkan oleh Kepala Sub Bagian Anggaran yang mengatakan :

“Sejauh ini yang dilakukan pemerintah untuk mencapai hasil yang diinginkan yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memanggil perwakilan dari setiap kelurahan/Desa untuk melakukan sosialisasi tentang program ini sehingga masyarakat bisa mengerti dan memahami sedikit banyaknya tentang program Bansos ini.” (Hasil wawancara tentang efisiensi pada tanggal 23 Nopember 2019)

Menurut informan di atas, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memanggil perwakilan dari setiap kelurahan/desa sehingga masyarakat bisa mengerti tentang program ini meskipun sosialisasi tersebut sudah tidak rutin lagi dilakukan. Sedangkan informan lain yang termasuk dalam salah satu penerima Dana Bansos mengatakan bahwa :

“Ya saya mengetahui tentang program ini, yang saya tahu program Dan Bansos adalah program pemerintah pusat yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin berupa beras bersubsidi tapi sekarang bukan beras bersubsidi lagi, melainkan bantuan sosial. Saya mengetahui program ini dari masyarakat dan juga sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pihak pemerintah, pemerintah pernah melakukan sosialisasi tetapi sekarang sudah jarang, hal itu mungkin karena masih banyak program baru yang lebih belum diketahui masyarakat banyak.” (Hasil wawancara penulis dengan salah satu Penerima Dana Bansos Pada Tanggal 23 Nopember 2019).

Menurut informan ini, pemerintah pernah melakukan sosialisasi namun kegiatan tersebut sudah jarang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, Program Dana Hibah dalam bentuk Bansos belum cukup efisien, hal tersebut karena masih kurangnya usaha pemerintah kabupaten untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai program tersebut, sehingga tidak sedikit masyarakat yang kurang paham apa sebenarnya maksud dan tujuan dari kebijakan Bansos tersebut.

Penulis melihat bahwa kurang pemahaman masyarakat mengenai program ini, sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa program ini sebatas Dana Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk masyarakat miskin saja. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya usaha pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan program Dana Bansos ini, serta keterbatasan akses masyarakat untuk mencari informasi lebih yang sebenarnya telah disediakan pemerintah melui media sosial maupun media cetak, kegiatan sosialisasi Bansos di Kabupaten Gianyar seperti gambar di bawah ini:



**Gambar 2**  
Sosialisasi Kebijakan Dana Bansos

Dokumentasi di atas merupakan salah satu contoh edukasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat di seluruh Indonesia, gambar tersebut menjelaskan tentang bagaimana alur permohonan dan pengambilan Dana Bansos yang benar, namun kurangnya akses yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan informasi selain dari sosialisasi yang diberikan pemerintah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program ini.

### ***Kecukupan***

Dalam kebijakan publik kecukupan dapat artikan dengan seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah. Dunn (2013:430) menyatakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Jadi kecukupan dalam evaluasi kebijakan publik memiliki hubungan dengan efektivitas dalam mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat mencukupi kebutuhan.

Kebijakan Bansos diberikan kepada masyarakat yang perekonomiannya di bawah garis kemiskinan. Pemerintah memberikan bantuan berupa Dana Bantuan Sosial Tunai yang jumlahnya ditentukan secara proporsional. Untuk melihat tingkat kecukupan Kebijakan Dana Bansos di Kabupaten Gianyar maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat Pemerintah Kabupaten Gianyar yang mengatakan:

“Menurut saya sudah tepat karena penerimanya benar-benar masyarakat miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, jadi dengan adanya program ini masyarakat bisa sedikit terbantulah, yang tadinya uang tersebut disisihkan untuk pembangunan, beli bibit, danielengkapan organisasi lain maka bisa dipergunakan untuk kebutuhan yang lainnya”. (Hasil Wawancara tentang kecukupan, Tanggal 23 Nopember 2019)

Pendapat yang sama juga dituturkan Kepala Sub Bagian Agama dan Sosial Sekretariat Daerah

Kabupaten Gianyar, yang menerangkan bahwa:

“Menurut saya cukup tepat karena, jika tidak ada program ini maka masyarakat akan lebih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi dengan adanya program ini masyarakat menjadi lebih sedikit terbantu karena mereka tidak perlu lagi memikirkan biaya untuk pembangunan fisik secara umum.” (Hasil wawancara tentang Kecukupan, Tanggal 24 Nopember 2019).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar yang memaparkan bahwa:

“Menurut saya sudah sangat tepat karena masyarakat sekarang banyak yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi dengan adanya program ini pasti masyarakat sangat terbantu mengatasi salah satu masalahnya yaitu dalam memenuhi kebutuhan Hidupnya”.(Hasil wawancara Tanggal 23 Nopmeber 2019).

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan terkait kecukupan kebijakan Dana Bansos dalam mengatasi permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat sudah tepat karena masyarakat sendiri merasa sangat senang dan sangat terbantu, hal ini penulis amati melalui kondisi sosial dan lingkungan yang mayoritasnya adalah masyarakat yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat. Penulis juga melihat bahwa Dana Bansos dalam bentuk tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sudah cukup baik dan tepat penggunaannya.

### **Perataan**

Perataan dalam kebijakan publik menurut Dunn (2013:434) yaitu kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Perataan dalam indikator evaluasi ini harus dapat menjawab pertanyaan tentang “apakah biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?”.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bagian kedua Kriteria Persyaratan Beanja Hibah Pasal 8, Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Aparatur Desa/Kelurahan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Gianyar b yang mengatakan bahwa:

“Ya pasti mengetahui, karena jumlah dana Bansos tersebut sudah jumlah besaran harga nasional yang langsung dipatokkan oleh pemerintah.”(Hasil wawancara Pada Tanggal Nopember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumenrasi yang telah dipaparkan penulis di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Dana Bansos di Kabupaten Gianyar sudah cukup merata serta tidak ada perbedaan biaya yang didistribusikan kepada masyarakat tersebut.

### **Responsivitas**

Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2013: 437). Adapun kriteria responsivitas itu penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon atau tanggapan dari sasaran kebijakan publik terhadap suatu kebijakan, maka dari itu keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari masyarakat yang menanggapi kebijakan tersebut, baik itu tanggapan yang baik berupa dukungan (positif) maupun tanggapan buruk berupa penolakan (negatif). Secara keseluruhan, respon masyarakat terhadap program ini cukup baik, seperti yang dikatakan oleh Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Gianyar, yang menjelaskan bahwa:

“Respon masyarakat sejauh ini masih baik-baik saja, belum ada keluhan yang sampai kesini karena selama ini juga kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak kecewa kalau penyalran dana tersebut mengalami keterlambatan penyalurannya.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Nopember 2019)

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Gianyar yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat pasti senang menerima manfaat dari program ini, tetapi kalau masalah kepuasan tergantung masyarakat, komplain pasti ada karena mindset orang berbeda-beda ada yang merasa puas, tetapi ada juga yang kurang bahkan tidak puas. Meskipun begitu, jika ada komplain dari masyarakat maka akan diberikan penjelasan.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Nopember 2019)

Selain informan di atas, ungkapan lain juga diberikan masyarakat pada saat melakukan wawancara antara penulis dengan informan mengatakan yang mengatakan bahwa:

“Program Dana Bansos ini bagus dan sangat bermanfaat khususnya bagi saya, karena sekarang semua serba mahal, semua harga naik. Jadi menurut saya program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.” (Hasil wawancara penulis dengan Penemira Dana Bansos pada tanggal 24 Nopember 2019).

Hal yang serupa disampaikan oleh informan lain yang mengatakan bahwa

“Ya baguslah, sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat kurang mampu seperti saya ini, apalagi kalau diperluas lagi programnya tentu akan lebih banyak manfaatnya.” (Hasil wawancara penulis dengan masyarakat penerima Dana Bnasos pada tananggal 24 Nopember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Dana Bantuan Sosial (Bansos) oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar sudah cukup berhasil, hal ini dapat dilihat melalui respon yang diberikan masyarakat terkait program ini, karena jika suatu program mendapat respon yang baik dari masyarakat maka program tersebut dapat dikatakan berhasil.

Kemudian penulis akan memaparkan hasil dokumentasi terkait responsivitas kebijakan Dana Bansos di Kabupaten Gianyar yaitu sebagai berikut:



**Gambar 3**  
Respon Masyarakat

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penulis dapat melihat bahwa evaluasi kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sudah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dan hasil yang didapat dari program ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Dan dengan adanya respon yang baik dari masyarakat, maka dapat dikatakan program tersebut

berhasil dalam mencapai tujuannya.

### ***Ketepatan***

Ketepatan atau kelayakan (Appropriateness) merupakan kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakandihubungkan dengan rasionalitas.

Untuk melihat tingkat ketepatan kebijakan Dana Bansos di Kabupaten Gianyar, penulis bertanya tentang sasaran dari kebijakan Bansos ini manfaat dari hasil kebijak tersebut. Seperti yang dikatakan oleh kepala Desa Sanding Kecamatan Tampak Siring Kabupaten Gianyar yang mengatakan bahwa:

“Sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat yang telah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka berhak untuk mendapatkan bantuan. Kalau soal ini saya rasa sudah cukup tepat khususnya di Desa Sanding dan di Kabupaten Gianyar secara umum, karena dari masyarakat sendiri tidak ada keluhan tentang penerima manfaat dari program ini sendiri. Dan menurut saya hasil yang dicapai pasti sangat bermanfaat bagi masyarakat” (Hasil wawancara pada tanggal 24 Nopember 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, penulis melihat bahwa masyarakat yang mendapat program ini benar-benar masyarakat yang kurang mampu dan berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini penulis amati melalui kondisi fisik dari penerima kebijakan Dana Bansos, namun penulis juga mendapati adanya masyakat atau kelompok/sanggar/sekaa yang telah beberap kali mendapatkan dana Bansos walaupun dalam bentuk jenis dan kegiatan yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa memang masih kurangnya perhatian pemerintah dalam melakukan suvei ke masyarakat yang mendapatkan program tersebut maupun memperbarui data yang ada, sehingga ada beberapa masyarakat yang seharusnya tidak lagi terdaftar menjadi sasaran kebijakan ini tetapi tetap menikmati hasil dari kebijakan Bansos tersebut.

Melihat dari kriteria ini, maka penulis berpendapat bahwa penyaluran Dana Bansos di Kabupaten Gianyar ini adalah memang yang berhak menerima bantuan tersebut. Karena rata-rata yang menerima bantuan ini sesuai dengan verifikasi yang telah di lakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati Gianyar maka masyarakat tersebut berhak untuk mendapatkan kebijakan Dana Bansos tersebut.

### ***Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar***

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial, yaitu :

#### ***Kinerja Pejabat Publik***

Pengangkatan dan penempatan pejabat publik dalam lingkup BPKD telah memenuhi proses tahapan seleksi oleh tim Baperjaka (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Kabupaten Gianyar sehingga pejabat tersebut selama ini telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara professional dan memiliki integritas tinggi terhadap pekerjaan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

#### ***Ketersediaan Sarana dan Prasarana***

Kelengkapan sarana dan prasarana telah cukup baik, adapun alat yang sudah tidak berfungsi dan perlu diganti akan dimasukkan pada APBD untuk dianggarkan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

### **Tingkat Pengetahuan Masyarakat**

Pelaksanaan proses pengajuan proposal diatur dan telah disosialisasikan ke masyarakat sehingga sebahagian kalangan telah mengetahui tatacara pengajuan proposal pada pemerintah Kabupaten Gianyar.

### **5. Simpulan**

**Efektivitas:** Kebijakan Dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Gianyar belum efektif, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Meskipun jumlah yang bertambah tidak begitu pesat, namun hal itu dapat menjadi bukti bahwa kebijakan Dana Bansos di Kabupaten Gianyar belum efektif kalau diperhatikan berdasarkan yang mengajukan permohonan dana Bansos setiap tahunnya.

**Efisiensi:** Kebijakan Dana Bansos ini belum cukup efisien, hal itu karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai program ini, hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya usaha pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi ataupun cara komunikasi lainnya.

**Kecukupan:** Kecukupan Kebijakan Dana Bansos di Kabupaten Gianyar dalam mengatasi masalah pokok yang dihadapi masyarakat sudah cukup tepat, hal ini karena masyarakat merasa terbantu dan keijakan ini tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.

**Perataan:** Perataan biaya dan manfaat yang didistribusikan kepada masyarakat di Kabupaten Gianyar sama. Dan untuk besaran biaya dan manfaat yang di distribusikan itu sama rata untuk semua lapisan masyarakat di Kabupaten Gianyar, masyarakat hanya perlu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

**Responsivitas:** Respon masyarakat yang ada di Kabupaten Gianyar sangat baik, dengan adanya respon yang positif dari masyarakat maka dapat dikatakan kebijakan Dana Bansos cukup berhasil.

**Ketepatan:** Sasaran dari Kebijakan Dana Bansos kurang tepat, karena masih adanya masyarakat/kelompok/organisasi/sekaa yang menerima Dana Bansos lebih dari sekali, hal ini terjadi kurangnya data sebagai informasi untuk memberikan Bansos tersebut. Sedangkan hasil yang didapat dari kebijakan Dana Bansos ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya program ini masyarakat merasa sangat terbantu dalam mengurangi beban pengeluaran mereka sehari-hari.

### **Daftar Pustaka**

- Davies, R., & Dart, J. (2005). *The 'Most Significant Change' (MSC) Technique: A Guide to Its Use*. United Kingdom: CARE International.
- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *JAR (Jurnal Administrative Reform)*, 2(4). doi:<http://dx.doi.org/10.30872/jar.v2i4.538>
- Subarsono, A. (2016). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Panduan Umum PKH oleh Kementrian Sosial RI Tahun 2013 dan Tahun 2016  
<http://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan/> diakses pada tanggal 01 Oktober 2017

- Ilmie, M Irfan. 2017. Mensos: PKH Efektif Turunkan Kemiskinan dan Kesenjangan. Diakses di: <http://www.antaraneews.com/berita/605438/mensospkh-efektif-turunkan-kemiskinan-dan-kesenjangan> pada tanggal 12 September 2017
- Quddus, Ghina Ghaliya. 2017. Analisis: PKH Tidak Efektif. Diakses di: <http://nasional.kontan.co.id/news/analisis-program-keluarga-harapan-tidakefektif> tanggal 27 September 2017
- Rahadian, Ar. 2017. Tingginya Angka Putus Sekolah Di Indonesia. Diakses di: <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus-sekolah-di-indonesia/> pada tanggal 12 September 2017.